

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PASAL 4 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45
TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN PNS WANITA
MENJADI ISTRI KEDUA KETIGA DAN KEEMPAT**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Hilmi Yusron Rofi'i

NPM: 1974130001



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PASAL 4 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45
TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN PNS WANITA
MENJADI ISTRI KEDUA KETIGA DAN KEEMPAT**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Hilmi Yusron Rofi'i

NPM: 1974130001

Pembimbing 1 : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing 2 : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami (*ta'addud al-zaujāt*) syariat islam yang dalam pensyariatannya dibenarkan oleh semua pihak, akan tetapi dalam praktiknya selalu mendapatkan pertentangan khususnya pada kaum perempuan islam.¹

Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa'(4): 3 sebagai berikut

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa'(4): 3)

Poligami dalam praktiknya di Negara Indonesia selalu mengalami pertentangan.² Disisi yang lain, poligami memiliki hujjah normative yang jelas dan tegas, namun juga banyak yang menolaknya dengan berbagai alasan, baik dengan alasan psikis, psikologis, kejiwaan serta isu keadilan.

Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia pada dasarnya berlaku untuk seluruh rakyat indonesia. Akan tetapi terdapat pula peraturan yang bersifat pengkhususan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

¹ Selain poligami masalah krusial tersebut adalah relasi hak milik (perbudakan) dan relasi seksual nikah kontrak isu tentang perbudakan hilang tanpa ada kejelasan status hukum dalam bentuk yang eksplisit, isu nikah kontrak ditolak oleh mayoritas ulama sunni dan poligami telah diterima secara luas, namun dengan melibatkan syarat yang ketat. Lihat: Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami; Pembacaan Atas Al-Quran Dan Hadist Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. ix.

² Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2006). h. 156.

Adanya perbedaan peraturan poligami antara undang-undang perkawinan dan PP No 45 tahun 1945. Perbedaan tersebut dikarnakan Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu aparatur sipil Negara, yang mana dalam kehidupan bermasyarakat menjadi percontohan segala tindak dan perilakunya, sehingga dalam rangka mengangkat muruwah pegawai aparatur sipil Negara maka di atur pelarangan mengenai wanita yang berstatus pegawai negeri sipil dilarang menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. Peraturan ini maksudkan untuk memberikan aturan disiplin guna maksimalitas kinerja pegawai agar terhindar dari persoalan keluarga yang ditimbulkan dari efekm poligami yang dapat mengganggu tugasnya sebagai pelayan public.³

Kemudian pada peraturan disiplin aparatur sipil Negara sebagaimana PP No 45 Tahun 1990, semua perkawinan dan perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil pria dan wanita juga harus dicatatkan dan dilaporkan ke badan kepegawaian Negara.⁴ Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan hak-hak yang melekat pada diri seorang Aparatur Sipil Negara.

Pengaturan mengenai poligami tertuang pada Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dapat persetujuan dari istri sebelumnya. Akan tetapi pada pegawai negeri sipil pengaturan mengenai poligami diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan peerceraian bagi pegawai negeri sipil, yang tertera dalam Pasal 4 (1) yang mengatur bahwa PNS Pria dapat berpoligami asalkan mendapatkan izin dari atasan, dan Pasal 4 (2) yang menyatakan bahwa PNS Wanita tidak di izinkan menjadi istri kedua ketiga atau keempat. Apabila PNS Pria melakukan

³ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Tanggal 21 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri sipil atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

⁴ Pejabat ialah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, memiliki wewenang memberikan atau menolak permintaan izin perkawinan atau perceraian Pegawai Negeri Sipil.

poligami tanpa izin maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemecatan secara tidak hormat dan apabila PNS wanita terbukti menjadi istri kedua, ketiga atau keempat maka mendapatkan sanksi administratif berupa diberhentikan secara tidak hormat.⁵

Beberapa contoh kasus penecatan PNS wanita yang terbukti menjadi istri poligami:

1. Pemecatan terhadap PNS wanita yang terbukti menjadi istri kedua, di lingkungan Pemkab Sidoarjo, terdapat dua wanita PNS yang terbukti menjadi istri kedua. Keduanya dipecat dari jabatannya. Pemecatan ini terjadi pada tahun 2010 dan 2011, yang mana pemecatan tersebut dikarenakan adanya pelanggaran Pasal 4 (2) PP No 45 Tahun 1990. Mengacu bahwa Pasal 15 (2), bahwa bagi PNS yang melanggar Pasal 4 (2) PP No 45 Tahun 1990 akan dijatuhi sanksi disiplin berat berupa pemecatan.⁶
2. Pemecatan terhadap PNS wanita yang terbukti menjadi istri kedua, di lingkungan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor pada tahun 2015.⁷
3. Pemecatan terhadap PNS wanita yang terbukti menjadi istri kedua, di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lebak.⁸

Kesenjangan terhadap pengaturan poligami antara PNS pria dan wanita, yang mana pria di izinkan poligami dengan catatan mendapatkan izin dari atasan, sedangkan bagi PNS wanita tidak memiliki peluang untuk menjadi istri kedua ketiga dan keempat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

⁵ Lihat Pasal 4 Ayat 1 dan 2, Pasal 15 PP No 40 Tahn 1990

⁶Glori K. Wadrianto, "Dua PNS Jadi Istri Kedua, Dipecat," *Kompas*, n.d., <https://regional.kompas.com/read/2012/01/16/08474545/dua.pns.jadi.istri.kedua>. (diakses pada 26 Maret 2020, Pukul 13.00)

⁷ Sahrul, "PNS Eselon II Jadi Istri Kedua," *Kupas Merdeka*, n.d., <https://www.kupasmerdeka.com/2015/10/pns-eselon-ii-jadi-istri-kedua-pejabat-berwenang-terkesan-tutup-mata/>. (diakses pada 26 Maret 2020, Pukul 13.00)

⁸ Sandi, "PNS Di Lebak Jadi Istri Kedua, Terancam Sanksi Pemecatan," *Fakta Banten*, n.d., <https://faktabanten.co.id/blog/2018/09/03/pns-di-lebak-jadi-istri-kedua-terancam-sanksi-pemecatan/>.(diakses pada 26 Maret 2020, Pukul 13.00).

Bagi Pegawai Negeri Sipil, apabila terbukti maka PNS wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat akan diberhentikan secara tidak hormat, padahal dari sisi materi wanita PNS yang dipoligami lebih terjamin dan tidak akan mengganggu keadaan ekonomi suami. Kemudian jika PNS pria melakukan poligami tanpa izin maka dikenakan salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 Ayat (4), sanksinya bertahap dimulainya dari penurunan kepangkatan, penurunan jabatan yang setingkat lebih rendah, dicopot dari jabatannya, dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Berdasarkan problem akademik yang disampaikan di atas, maka penting dan layak untuk meneliti analisis hukum keluarga Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis atau peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Terdapat kasus pemecatan bagi PNS wanita yang ketahuan menjadi istri kedua.
- b. Adanya larangan PNS wanita untuk menjadi istri kedua ketiga dan keempat.
- c. Terdapat penerapan atau perlakuan hukum perkawinan yang berbeda, antara masyarakat biasa dan pegawai negeri sipil.
- d. Adanya ketidakadilan atau disharmoni peraturan poligami antara PNS pria dan wanita dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
- e. Eksistensi keadilan dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil belum tampak.

- f. Penyimpangan terhadap asas hukum *lex superiori derogot legi priori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang posisinya ada dibawah, tidak boleh bertentangan dengan yang diatasnya.

2. Batasan Masalah

Penelitian pada tulisan ini dibatasi atas:

- a. Larangan PNS Wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap larangan PNS Wanita Untuk Menjadi Istri Kedua, Ketiga dan Keempat berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

3. Rumusan Masalah

Adapun yang dijadikan rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengapa wanita PNS dilarang menjadi menjadi istri kedua, ketiga dan keempat berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil?
- b. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam tentang larangan Wanita PNS Untuk Menjadi Istri Kedua, Ketiga dan Keempat berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui alasan wanita PNS dilarang menjadi menjadi istri kedua, ketiga dan keempat berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- b) Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam tentang larangan wanita PNS Untuk Menjadi Istri Kedua, Ketiga dan Keempat berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang larangan bagi PNS wanita untuk di poligami.
- b. Penelitian ini dirasa dapat menambah kekayaan khazanah dan pengembangan keilmuan terkhusus pada ilmu hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna penyelesaian sekolah program magister studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan kepada pemegang kekuasaan untuk mengatur mengenai poligami bagi pegawai negeri sipil yang berkeadilan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan larangan wanita pns menjadi istri kedua ketiga dan keempat, antara lain :

- a) Machfudz, Mochammad, penelitian tesis pada tahun 2014 di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "*Prinsip Kesetaraan Gender Dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) Tentang Larangan Dipoligami Bagi PNS Wanita*" (Studi Pandangan Pakar Hukum di Kota Malang).⁹
- b) Amar Ma'ruf, Penelitian tesis pada tahun 2013 di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul *Implementasi Peraturan Perkawinan Dan*

⁹ Machfudz Muhammad, "Prinsip Kesetaraan Gender Dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan Dipoligami Bagi PNS Wanita" (Studi Pandangan Pakar Hukum Di Kota Malang)," (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

*Perceraian PNS Dan Pejabat (Studi Pp No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990).*¹⁰

- c) Awaliah Musgamy, Jurnal Al-Daulah Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul *Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam PP. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS.*¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah belum adanya penelitian terdahulu yang membahas analisis hukum keluarga Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Yang penulis temukan adalah beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai kajian gender, respon PNS dan implementasi PP 45 Tahun 1990, oleh sebab itu penulis akan meneliti lebih dalam.

F. Kerangka Pemikiran/Teori

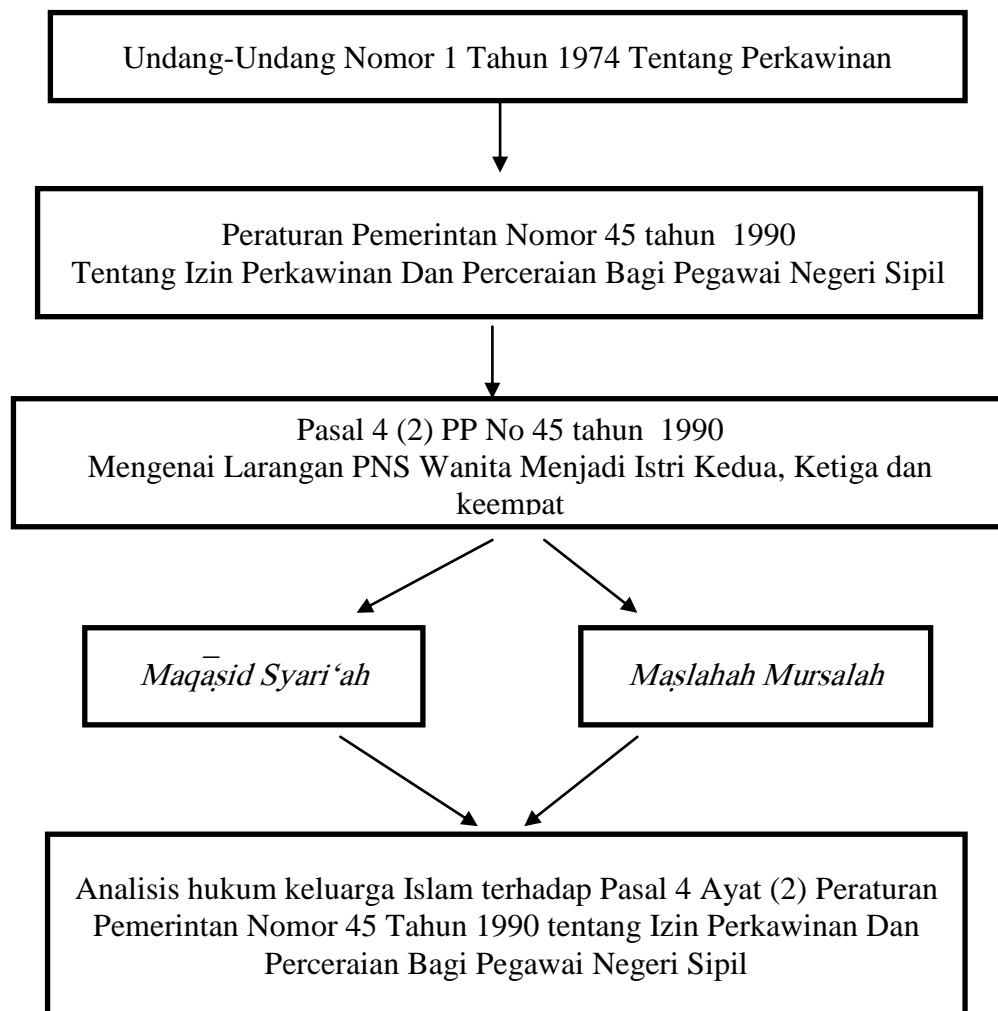
Setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pikir dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Pada penelitian ini alur berfikirnya berangkat dari larangan perkawinan, sebagai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak mengatur mengenai larangan perkawinan dengan sebab profesi, sementara itu didalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, jika ada PNS wanita yang terbukti menjadi istri kedua, ketiga dan keempat maka akan dikenakan sanksi berupa pemecatan. Kemudian akan di analisis dengan menggunakan teori *maqāṣid syari'ah* untuk mengetahui sejauh mana tujuan syariat tercapai didalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah

¹⁰ Amar Ma'ruf, "Implementasi Peraturan Perkawinan Dan Perceraian Pns Dan Pejabat (Studi Pp No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

¹¹ Awaliah Musgamy, "Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam PP. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pns," *Al-Daulah* Vol. 6., No. 2 (2017).

Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan selanjutnya akan di analisis dengan menggunakan teori *maṣlahah mursalah* untuk mengetahui tingkat kemaslahatan yang ada didalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar kerangka pemikiran berikut ini:



G. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta kedalaman dalam menganalisis, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.¹² Pada penelitian ini akan meneliti mengenai ketentuan larangan PNS Wanita menjadi istri kedua, ketiga dan keempat, sebagaimana di atur didalam Pasal 4 Ayat (2) PP 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendefinisikan dan menjelaskan karaktersitik serta tertentu dari penelitian.¹³ Metode ini digunakan untuk dapat menggambarkan mengenai ketentuan larangan PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga dan keempat sebagaimana Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁴ pada penelitian ini menggunakan data sekunder, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yang terdiri dari:

¹² Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004). h. 2-3.

¹³ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mix Method*, Cet. Ke-3 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019). Sudaryono. h. 88.

¹⁴ Arikunto, "Suharsimi Arikunto.Pdf," in *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik-Revisi Ke X*, 2010.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Bahan hukum sekunder adalah seluruh referensi hukum yang terdiri dari dokumen tidak resmi, terdiri dari buku, penelitian, jurnal karya ilmiah dan lain sebagainya.¹⁶, dalam penelitian ini mencakup buku, penelitian, karya ilmiah, yang relevan.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah semua tulisan yang bersifat sebagai pelengkap, atau bahan non hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum tersiernya berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab, KBBI, Ensiklopedia dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pencarian data yang diperoleh dengan cara meneliti buku, literatur, catatan dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.¹⁸ Pengumpulan data pada penelitian ini dengan mengumpulkan data-data yang di butuhkan dalam penelitian, yakni berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier yang relevan topik penelitian.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-5,. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)., h. 47

¹⁶ *Ibid.*, h. 54

¹⁷ *Ibid.*, h. 57

¹⁸ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). h. 27

4. Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul agar sesuai dengan topic masalah yang akan diselesaikan.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil telaah dari bahan penelitian mengenai ketentuan larangan PNS wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu seluruh data yang telah terkumpul kemudian dirapihkan dan disusun sehingga dapat mudah dipahami.²⁰
- c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data sesuai dengan kaidah-kaidah sistematika penelitian yang urut dan logis.²¹ Selanjutnya data di susun sesuai dengan kerangka dan sistematika berdasarkan pedoman penulisan tesis.

5. Analisis Data

Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang data penelitian yang akan dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana.²² Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, Sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:²³

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang

¹⁹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).h. 85

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). h. 126

²¹ Ibid.

²² Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan.*, h. 70

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta (Bandung, 2007)., h. 204

bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian, dengan cara membaca literature mengenai ketentuan larangan PNS wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat.

b. Penyajian Data

Seluruh data yang sudah terkumpul kemudian dinarasikan dalam rangka untuk menampilkan gambaran hasil dari data yang telah di reduksi, mengenai ketentuan larangan PNS wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat dalam PP 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

c. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam proses pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena kemudian menggunakan metode deduktif yang mengumpulkan data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni berangkat dari larangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Islam lalu ke peristiwa khusus mengenai ketentuan larangan PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga dan ke-empat dalam PP 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu pernikahan menjadi sebuah upacara yang agung dan sakral. Menurut Imam Syafii, pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Menurut Imam Hanafi yaitu akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara'.²⁴

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-nikah*.²⁵ *Al-nikah* bermakna *al-waṭi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat *al-waṭ'u wa al-'aqdu* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²⁶ Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *misqan galiḍan* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,²⁷ dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam perspektif sosiologis, diartikan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta “penghargaan dan kehilangan” yang terjadi di antara sepasang suami istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan meraka yang berbeda,

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 132

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Quran, 1973), h. 468.

²⁶ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 38

²⁷ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan serta disepakati bersama.²⁸ Dengan demikian, dalam konteks sosiologi, bahwa perkawinan tidak akan terjadi bila tidak ada kesepakatan bersama, untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh nabi Muhammad Saw untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang keji, yaitu perzinahan.

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam. Di dalam bab 1 pasal satu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³⁰ Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Az-Zariyyat (49): 49 yaitu:

²⁸ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 137

²⁹ Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. XII, No. 4 Desember 2015, h.807. Dapat dilihat di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>

³⁰ Tihami dan Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 6.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az-Zariyyat (49): 49)

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* mendefinisikan nikah sebagai berikut:

الرَّوْحِيَّةُ سُنَّةٌ مِنْ سُنَّةِ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وَالتَّكْوِينِ وَهِيَ عَامَةٌ لَا يَسُدُّ عَنْهَا عَالَمُ الْإِنْسَانِ أَوْ عَالَمُ الْحَيَوَانِ أَوْ عَالَمُ النَّبَاتِ

Artinya : “Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan.”³¹

Kata nikah dalam Al-Qur’an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa’ (4): 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa’ (4): 3)

Contoh lain adalah firman Allah QS. An-Nisa’ (4): 22, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ

فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Beirut Lebanon: Dār Al-Fikr), h.1

Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (QS. An-Nisa' (4): 22). "

Kedua ayat di atas dipahami untuk mengurai dan mengartikan semata-mata untuk melaksanakan akad nikah (menikah), bukan berarti *al-wat'u* atau *al-jima'u* (melakukan hubungan seksual). Sedangkan contoh menikah yang artinya melakukan hubungan seksual ³² (*al-wat'u* atau *al-jima'u*) adalah sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS. Al-Baqarah (2) : 230)

Ayat ini menjelaskan bahwa nikah diartikan sebagai *al-wath'u* atau *al-jima'u* (melakukan hubungan seksual). Apabila seorang istri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak dua kali, maka ia masih dapat melakukan ruju' dengan suami yang pertama. Apabila suami telah menjatuhkan talaq yang ketiga kalinya, maka suami sudah tidak bisa menikah lagi dengan mantan istrinya, kecuali ada muhallil. Jadi si mantan istri harus menikah dengan laki-laki lain (suami yang kedua), lalu bercerai dan melaksanakan iddah, baru dapat menikah lagi dengan suami yang pertama.³³

Para ulama' berbeda pendapat dalam memahami makna nikah, ada yang memaknai secara hakiki dan secara *majazi*, sebagai berikut:

³² M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan Ke-6, (Bandung: Mizan, 1997), h.191.

³³ *Ibid*, h. 191

Pendapat pertama (Imam Syafi'i) yang di shahihkan oleh Abu Thayib, Mutawali dan Qadi Husain: bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan terkadang dipakai secara *majazi* untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat shahih dari madzhab Syafi'i.³⁴

Pendapat kedua (Imam Hanafi): mengemukakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara *majazi* untuk menyebut akad nikah³⁵.

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama; makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *'izzah* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.³⁶

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut

Al-Quran telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan aturan

³⁴ Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (T.k: t.p, t.t), h.460.

³⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Alā Madzāhibi al-Arba'ah*, (Kairo: Dārul Hadist al-Qahira, t.t), Juz 4, h.7.

³⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, h.7.

tersendiri. Dilihat dari dasar hukum perkawinan dapat disusun berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.

1) Berdasarkan Al-Qur'an

Allah SWT, Berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa (4):1)

Allah SWT Berfirman dalam Q.S. An-Nur (24) :32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. An-Nur (24) :32).

2) Hadis:

Rasulullah SAW. Bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud berkara, Rasulullah SAW. Bersabda “Hai para pemuda, siapa yang diantara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinilah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundakan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan: dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknyalah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.” (Muttafaq ‘alaihi).³⁷

تَزَوُّجُ الْوُلُودِ الْوُدُودَ فَإِنَّ مَكَاثِرَ بَكْم (رواه ابو داود والنسائي والحاكم، وصححه
الالباني)

Artinya: “Menikah dengan wanita-wanita yang penuh cinta kasih dan banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian (pada hari kiamat kelak). (HR. Abu Daud, Nasa’i, Al-Hakim, dan disaksikan oleh Al-Bani).

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan menentukan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat,³⁸ atau adanya calon pengantin laki laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.³⁹

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khairudin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.⁴⁰ Namun

³⁷ Abu Abdillah Bin Isma’il, *Shohih Bukhari*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Hadis No 4677.

³⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi’awwaliah*, Juz I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.9; lihat Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 45-46.

³⁹ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.46.

⁴⁰ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2005), h.29.

diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- c. Adanya 2 orang saksi;
- d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam,⁴¹ yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan;
- b. Mahar atau mas kawin;
- c. Calon pengantin laki-laki;
- d. Calon pengantin perempuan;
- e. *Sighat* akad nikah

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh Al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:⁴²

- a. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);
- b. Wali (dua orang yang melakukan akad); yaitu wali atau wakil dari calon suami);
- c. Dua orang saksi;
- d. *Sighat* akad nikah (*ijab* dan *qabul*)

Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah hanya ijab dan qabul saja (akad yang dilakukan pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:⁴³

⁴¹Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy Al-Maliki, *Qowanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah*, (Birut: Da>r Al-Ilmi Li Al-Maliyyin, 1974), h.219.

⁴² Abi Zakariya Yahya Al-Nawawi, Edisi Syaih 'Adil Ahmad Abd Al-Maujud, *Raudah At-Talibin*, Cetakan kesatu (Birut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1412H/ 1992M), h.382-400; lihat Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maalibari, *Fathu Al-Mu'in bi Syarh Quratu Al-A'in*, (Cirebon: Al-Maktaba Al-Misria, t.t), h.99.

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki laki dan mempelai perempuan;
- b. Adanya wali;
- c. Adanya saksi;
- d. Dilakukan dengan *sighat* tertentu.

Ibnu Qadamah dari mazhab Hambali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statemen yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebut perkawinan sah bila ada wali dan ada saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qadamah, adalah sabda nabi yang mengatakan: “Tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali”⁴⁴

Jadi yang dimaksud dengan syarat sah perkawinan disini ialah syarat yang bertalian dengan rukun rukun perkawinan, yaitu syarat syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

Menurut Ibnu Rusyd, bahwa membayar mahar menurut kesepakatan ulama-ulama hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat sah pernikahan.⁴⁵ Hal ini juga di perkuat berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’ (4): 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ خِلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’ (4): 4).

Dalam firman Allah lainnya QS. An-Nisa’ (4): 24 yaitu:

⁴³ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h. 48-49.

⁴⁴ Abi Muhammad bin Ahmad bin Qadamah, *Al-Mughni*, Cetakan 1, (Birut: Daar Al-Fiqr, 1404H/ 1984M), h. 337-342.

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Semarang: Usaha Keluarga, T.t.h., cet 2), h. 14.

وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS.An-Nisa’ (4): 24)

Hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing masing orang atau berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan calon suami tersebut.

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلءَ كَفِّهِ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحْلَ (رواه ابو داود)⁴⁶

Artinya: “Umar bin Khathab berkata; saya mendengar Rasul SAW bersabda. Barang siapa yang memberi tepung gandum atau kurma sepenuh dua telapak tangannya untuk mahar seorang wanita, maka halal baginya untuk menggaulinya”. (HR. Abu Dawud)

⁴⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Maktabah al-‘Is}riyah, t.t), No. 1042

4. Hukum Melaksanakan Perkawinan

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubahtergantung* kepada tingkat masalahnya. Meskipun perkawinan itu asalnya *mubah*, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaanya itu sebagai berikut:⁴⁷

a. Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu, tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

b. Sunnah

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan perbuatan zina, memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat, maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina.

c. Haram

⁴⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 16.

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban bathin seperti mencampur istri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantar dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melanggar hak-hak istri, berkelahi dan menahanya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan.

d. Makruh

Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberibelanja istri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis, (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

e. Mubah

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan ibahah inilah yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari

nikah.⁴⁸ Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum dikenai hukum wajib untuk menikah, dan juga tidak dikenai hukum untuk haram menikah.⁴⁹

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan bagi orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan menikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁵⁰

5. Prinsip Dalam Melaksanakan Perkawinan

Prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam.

Ada beberapa ayat Al-Quran yang berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya:

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 187:

... فَأَلْزَمَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ...

Artinya: "...Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu" ... (Q.S. Al-Baqarah (2): 187)

⁴⁸ Muhammad Ammin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 91-93.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), h. 22.

⁵⁰ Abdur Rahman Ghazali, ... h. 51.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 228:

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...

Artinya: "... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf"...(Q.S. Al-Baqarah (2): 228)

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 233:

... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ...

Artinya: "... Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan..."(Q.S. Al-Baqarah (2): 233)

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl (16): 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ...

Artinya: "...Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil..." (Q.S. An-Nahl (16): 90)

Allah berfirman dalam Q.S At-Thalaq (65): 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."(Q.S At-Thalaq (65): 7)

Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum (30): 21)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Khoiruddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:⁵¹

- a. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
- b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga;
- c. Prinsip menghindari kekerasan;
- d. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai sebagai partner;
- e. Prinsip Keadilan.

Prinsip-prinsip perkawinan menurut undang-undang perkawinan, sebagaimana termaktub di dalam penjelasan umumnya, sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁵²
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan adalah sama hal nya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran,

⁵¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005), h. 56

⁵² Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974, Butir 4.a

kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.⁵³

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.⁵⁴
- d. Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, maka undang-undang perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita.⁵⁵
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.⁵⁶ Untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) serta harus dilakukan

⁵³ Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974, Butir 4.a

⁵⁴ Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974, Butir 4.a

⁵⁵ Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974, butir 4.d

⁵⁶ Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974, butir 4.e

didepan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam.

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri⁵⁷

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut undang-undang perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

Asas-asas hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang;
- c. Asas monogami terbuka;
- d. Asas calon suami istri telah siap jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sehingga tidak berfikir kepada perceraian;
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian;
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat;
- g. Asas pencatatan perkawinan.

⁵⁷ Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974, butir 4.f

B. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam

Larangan perkawinan atau *mahram* yang berarti terlarang, “sesuatu yang terlarang” maksudnya yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan perkawinan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu perkawinan.⁵⁸ Larangan kawin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut syara’ dibagi menjadi dua, yaitu larangan perkawinan berlaku untuk selamanya (*mahram mu’abbad*), dan larangan perkawinan untuk sementara (*mahram muaqqat*), berikut penjelasannya:⁵⁹

1. Larangan abadi (*mahram mu’abbad*) yang disepakati terdiri dari: hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan perkawinan, sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu zina, dan li’an.⁶⁰ Yang telah disepakati:

a. Hubungan Nasab

Al-Quran memberikan aturan yang tegas dan terperinci yaitu dalam QS. An-Nisa’ (4):23, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet.ke- III, 2005), h. 640.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2011), h. 110.

⁶⁰ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor, Kencana, Cet. Ke- 1, 2005), h. 103.

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa' (4):23)*

Berdasarkan ayat di atas perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi adalah karena adanya ikatan nasab atau ikatan darah, diantaranya sebagai berikut:⁶¹

- a. Ibu, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
- b. Anak perempuan, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- d. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu.
- e. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan.
- b. Hubungan sepersusuan (*Rada'*)

⁶¹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor, Kencana, Cet. Ke- 1, 2005), h. 105.

Perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri. Larangan pernikahan karena susuan sama halnya dengan larangan karena nasab sebagaimana sabda nabi: Artinya: “Dari Aisyah berkata: “Rasulullah saw bersabda diharamkan pernikahan karena susuan sebagaimana diharamkan karena nasab.”

Hubungan karenan sesusuan adalah: ⁶²

1. Ibu Susuan, yaitu wanita yang pernah menyusui seorang anak yang dianggap seperti ibu kandung. Karena dengan air susu dapat menjadi darah dan daging dalam pertumbuhan seorang yang telah disusainya.
2. Nenek susuan, ibu dari wanita yang telah menyusui atau ibu dari suami wanita yang telah menyusui.
3. Bibi susuan, saudara perempuan ibu susuan atau saudara suami dari ibu susuan.
4. Kemenakan perempuan susuan, anak perempuan dari saudara sesusuan.
5. Saudara susuan perempuan.

Ulama' berbeda pendapat mengenai kadar susuan yang menyebabkan terlarangnya pernikahan. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa hal ini tidak ada kadar batasan tertentu, bagi mereka berapapun kadarnya tetap menjadikan keharaman, pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Abu Hanifah serta pengikutnya, sedangkan *fuqaha'* yang lain menentukan batas kadar yang menyebabkan keharaman, yang terbagi dalam tiga kelompok,

⁶² Ibid., h. 106

pendapat yang pertama berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi yang menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan keatas. Pendapat kedua berpendapat yang menyebabkan keharaman adalah lima kali susuan. Dan pendapat ketiga berpendapat bahwa yang menyebabkan keharaman adalah sepuluh kali susuan.⁶³

c. Hubungan Perkawinan atau Semenda

Adapun halangan karena perkawinan atau semenda adalah:⁶⁴

1. Ibu mertua (ibu dari istri).
2. Anak perempuan dari istri dengan ketentuan istrinya sudah digauli.
3. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki.
4. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.

Larangan yang masih di selisihkan ada dua yaitu;

1. Zina

Menikahi perempuan pezina adalah haram. Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, kecuali sesudah mereka bertaubat.⁶⁵ Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran QS. an-Nur (24): 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki

⁶³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 35.

⁶⁴ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2012), h. 166-167.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 581.

yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. an-Nur (24): 3).

2. Li'an

Apabila terjadi sumpah *li'an* antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selamanya.

2. Larangan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*) yaitu larangan kawin yang bersifat sementara. Yang termasuk dalam keharaman ini adalah:

- a. Halangan mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu pernikahan.

Perkawinan ini menyebabkan terputusnya silaturahmi yang akan menyebabkan perpecahan keluarga dan permusuhan yang disebabkan kecemburuan dari dua istri, kecuali jika istri meridai suami untuk melakukan hal ini. Larangan ini berdasarkan QS. An-Nisa' (4): 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَحَلَائِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa' (4): 23).

Selain Surat an Nisa' terdapat hadis Nabi yang menjelaskan larangan mengumpulkan dua saudara dan juga mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Artinya: "Dari Abi Hurairah berkata dari Nabi saw. bersabda: melarang mengumpulkan seorang wanita dengan bibi dari ayahnya ('ammah) atau dengan bibi dari ibunya (khalah)."

- b. Halangan peristrian, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, sampai ia bercerai dan menyelesaikan masa iddahnya. Keharaman ini disebutkan dalam QS. an-Nisa' (4): 24:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ۖ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ فَرِيضَةٌ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَايْتُمْ بِهِ ۖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾

Artinya: . dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki; (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada

mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.. (QS. An-Nisa' (4): 24).

- c. Halangan 'idah, wanita yang sedang dalam masa 'iddah baik karena bercerai maupun karena ditinggal mati suaminya juga diharamkan untuk melamarnya tetapi tidak ada larangan untuk menyatakan dengan sindiran. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah (2): 235).

- d. Halangan talak, wanita yang ditalak tiga haram menikah lagi dengan bekas suami, kecuali jika sudah menikah lagi dengan orang lain serta telah diceraikan dan telah berhubungan kelamin dan habis masa 'iddahnya.
- e. Halangan ihram, wanita yang sedang melakukan ihram, baik

ihram umrah maupun ihram haji.

- f. Halangan kafir, menikahi wanita yang tidak beriman kepada Allah.

Menikahi wanita kafir diharamkan karena tidak mempunyai keimanan kepada Allah, oleh karena itu, ia bisa berhianat kepada suaminya dan merusak akidah anak-anaknya.⁶⁶

- g. Halangan kehambaan, jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh laki-laki merdeka menikah dengan budak, kecuali karena tidak mampu menikah dengan perempuan merdeka dan takut terjerumus ke dalam zina.⁶⁷ Menikah dengan perempuan budak maka anak yang dilahirkan nanti menjadi budak.
- h. Halangan Sakit, yaitu apabila salah satu pihak mengalami sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.

C. Tinjauan Poligami

1. Poligami dalam Hukum Islam

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari QS. An-Nisa' (4):3),

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS.An-Nisa' (4): 3)

⁶⁶ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-3, 2008), h. 590.

⁶⁷ Sayyid Ibid, h 578.

Allah SWT memberikan sebuah peluang untuk menikahi lebih dari satu perempuan, akan tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan. Allah SWT membolehkan kebolehan berpoligami dengan ungkapan “jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja”. Firman Allah SWT surat an-Nisa’ ayat (3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi “jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan isteri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai isterimu”.⁶⁸

Secara implisit Al Qur’an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning “apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain”.⁶⁹

Allah Swt berfirman pada Surat An-Nisa’ (4): 129 mengenai tata aturan pembolehan poligami, sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di*

⁶⁸ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Privat Law*, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, h. 101

⁶⁹ Ibid, h. 102

antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.An-Nisa' (4): 129)

Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam al-Qur'an QS. An-Nisa' (4): 3 dan 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen berikut :⁷⁰

“Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendaknya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu' selaku syarat sahnya shalat, dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu'. Maka shalat dan wudhu' tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami. Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah dimana qadhi dapat menjatuhkan kepadanya hukuman ta'zir. Akan tetapi kalau kita jadikan adil itu syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal. Dalam hal ini ternyata tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat demikian. Jika kita memandang bahwa adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketiadaan adil tidak dapat dijadikan mani' (penghalang) bagi kebolehan berpoligami”.

Prof. KH Ibrahim Hosen memberikan mengenai adil dalam poligami yang di atur di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 adalah adil sebagai syarat agama bukan syarat hukum kebolehan berpoligami. Oleh karena itu pada dasarnya kebolehan berpoligami itu adalah mutlak dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. Dalam hal adil ini, apakah terhadap isteri tunggal dalam perkawinan monogami tidak

⁷⁰ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan, Jilid I, cetakan pertama*. (Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia, 1971), h. 36

dituntut berlaku adil, hanya saja kapasitas adil dalam perkawinan poligami lebih berat, karena itulah Allah SWT memberikan warning agar berhati-hati dan tidak secara sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian isteri dengan mengabaikan yang lain.⁷¹

Syarat-syarat dan alasan-alasan hukum kebolehan berpoligami yang kita temui dalam hukum Islam dewasa ini merupakan hasil ijtihad para ulama dalam lingkup kajian fiqh, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk ditransformasikan kedalam hukum positif sebagai hukum Islam yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam setempat, seperti di Indonesia, lahirnya Kompilasi Hukum Islam dalam rangka pembentukan unifikasi hukum Islam yang berlaku bagi muslim Indonesia.⁷²

2. Poligami dalam Hukum Positif

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu Polu dan Gamein. Polu berarti banyak, Gamein berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak. Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri- isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya.⁷³

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqh poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.⁷⁴

⁷¹ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama", h. 103

⁷² Ibid, h. 103

⁷³ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), h. 11

⁷⁴ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 16

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 dan 4 mengatur, poligami merupakan salah satu tradisi jahiliyah yang diperangi oleh umat Islam secara berangsur-angsur, sebab dahulu pada umumnya orang arab melakukan poligami tanpa batas.⁷⁵ Pada saat itu, seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari empat orang dianggap suatu hal yang biasa/lumrah. Pada masa sekarang, satu sisi poligami ditolak melalui berbagai argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis dan ketidakadilan jender. Tapi pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran-sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.⁷⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun pencatatan perkawinan dibuktikan dengan adanya buku nikah sifatnya hanya administratif belaka dan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Meskipun bersifat administratif, pencatatan perkawinan merupakan kebijakan ulil amri yang harus didukung dan ditaati. Menurut Hazairin, termasuk kebijakan ulul amri adalah ketentuan yang berwujud pembentukan garis hukum baru bagi keadaan-keadaan baru menurut tempat dan waktu dengan berpedoman pada kaidah hukum yang ada dalam al Quran dan hadits.⁷⁷ Subtansi dari hukum perkawinan ini mengambil dari fiqh munakahat yang terdapat di beberapa kitab-kitab klasik yang banyak beredar dan diamalkan oleh komunitas muslim di Indonesia, bersamaan dengan datangnya agama Islam di Indonesia.

Fiqh munakahat dengan varian madzhab hukum yang ada terdapat ketentuan yang mengatur tentang berbagai persoalan yang terkait dengan

⁷⁵ Al Thohir Al Hadad, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus 1993), h. 6

⁷⁶ Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 156.

⁷⁷ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1984), h. 65.

perkawinan, termasuk juga ketentuan poligami yakni suami mempunyai isteri lebih dari satu. Ketentuan tentang poligami yang terdapat dalam fiqh munakahat klasik ini kemudian diakomodir dalam regulasi tentang perkawinan di Indonesia.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam beberapa literatur fiqh klasik dikemukakan bahwa ketentuan tentang poligami sangat terkait dengan asas keadilan suami. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir bathin terhadap isteri-isterinya, terhadap anak-anaknya, mertua-mertuanya dan juga keluarga isteri dan isterinya. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Menurut penulis, karena pentingnya asas keadilan ini maka asas ini disebut sebagai asas dari semua asas hukum Islam.⁷⁸ Perkawinan dalam konsep fiqh munakahat tidak hanya melibatkan sosok suami dan sosok isteri semata, tetapi perkawinan merupakan pertalian antara dua keluarga besar suami dan isteri dalam segala akibat sosial yang ditimbulkannya. Di dalam hukum perkawinan dianut bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan (suami maupun isteri) maka pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang.

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan⁷⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ini, menurut penulis, nampak jelas dan terkesan bahwa isteri menjadi objek penderita. Ketentuan Pasal 4 ini

⁷⁸ Ali Imron, *Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007), h. 38

⁷⁹ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

apabila dilihat dari kaca mata hakikat perkawinan, nampak sekali bahwa suami sangat arogan, egois, dan ingin menang sendiri. Nampak bahwa konstruksi sosial sangat mewarnai regulasi tentang poligami ini. Bagaimana tindakan hukumnya apabila ketentuan Pasal 4 tersebut mengarah pada kondisi fisik dan psikis suami. Suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami; suami mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan suami tidak mampu memberikan keturunan (karena mandul atau yang sejenisnya). Oleh karena itu menurut penulis perlu adanya rekonstruksi terhadap persyaratan poligami ini.

Disamping persyaratan tersebut, hukum perkawinan juga menambahkan persyaratan:⁸⁰

- a. Ada persetujuan dari isteri atau isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ayat berikutnya menyebutkan bahwa persetujuan dari isteri atau isteri tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri- isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas.

Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1

⁸⁰ Pasal 5, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.⁸¹

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam Pasal 43 disebutkan bahwa “apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer.

Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam

⁸¹ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*. (Jakarta: Ditbinbaga Islam, 1997).

tentang perlunya transformasi hukum Islam kedalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan ummat Islam dalam bidang mua'amalah.

3. Dampak Poligami

a. Dampak Poligami bagi Istri

Dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya terlihat bahwa praktek poligami lebih banyak membawa dampak negatifnya bila dibandingkan dengan positif. Dampak positif poligami secara sederhana bisa kita telaah dari QS. An-Nisa (4): 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa (4): 3)

Menurut Supardi Mursalin ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim. Ayat tersebut diturunkan ketika banyak wanita Madinah ditinggal mati suami mereka yang gugur di medan Perang Uhud dan banyak pula anak-anak yang sudah tidak berapak lagi. Pada masalah ini, kaum Muslim memecahkannya dengan memanfaatkan lembaga yang telah ada dan lazim, yakni dengan mengawini dua, tiga atau empat wanita di antara janda-janda tersebut. Dampak positif dari poligami adalah untuk menolong janda-janda dan anak-anak yatim yang mereka

tanggung.⁸²

Menurut Musdah Mulia poligami dapat memberikan dampak psikologis pada istri, diantaranya:⁸³

- 1) Istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain
- 2) Terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berlainan ibu
- 3) Ada persaingan tidak sehat di antara istri. Hal itu dilakukan hanya untuk menarik perhatian lebih banyak dari suaminya. Mereka berjuang sedemikian rupa untuk menjadi paling menarik dan paling baik di hadapan suaminya agar mendapatkan perhatian yang lebih dari suaminya. Permusuhan di antara istri terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda dibanding istri yang terdahulu.

Menurut Spring dampak psikologis terhadap istri pertama yang komitmen perkawinannya dikhianati sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Kehilangan hubungan baik dengan suaminya dan akan bertanya siapakah ia sekarang. Sebelumnya ia adalah seorang yang dicintai, menarik dan berbagai hal positif lainnya. Gambaran ini berubah setelah suami menikah lagi. Gambaran diri berubah menjadi negatif, korban kehilangan diri.
- 2) Bukan lagi seseorang yang berarti bagi suaminya. Ia akan segera menyadari bahwa ia bukan lagi satu-satunya orang yang berada di sisi suami yang dapat membahagiakan pasangannya.
- 3) Menjadi seorang yang sensitif dan mudah marah
- 4) Kehilangan hubungan dengan orang lain.

⁸² Bingah Amarwata Sujana, "Kritik Terhadap Poligami: Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Padjadjaran Law Review*, Vol. III, Desember 2015, h. 68

⁸³ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 136-143

⁸⁴ *Ibid*, h.69

b. Dampak Poligami Bagi Anak

Sudah menjadi keharusan bagi orang tua untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya, karena anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang wajar dari orang tuanya akan menimbulkan kelemahan pada diri anak dalam perkembangan dan pertumbuhan psikologisnya, anak menjadi pemalas dan kehilangan semangat dan kemampuan belajarnya. Di samping itu tidak jarang menimbulkan terjadinya kenakalan-kenakalan dan traumatik bagi anak hingga mereka berkeluarga. Terjadinya tindakan-tindakan atau kasus-kasus tersebut merupakan akibat negatif dari keluarga yang berpoligami yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut: ⁸⁵

1) Anak merasa kurang disayang.

Salah satu dampak terjadinya poligami adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya, dalam arti mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak yang lain yang orang tuanya selalu kompak. Adanya keadaan demikian disebabkan karena ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bertemu antara ayah dan anak, maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Kurangnya kasih sayang ayah kepada anaknya, berarti anak akan menderita karena kebutuhan psikisnya yang tidak terpenuhi. Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan dari ayah kepada anak-anaknya akan menyebabkan anak tumbuh dan berkembang dengan bebas. Dalam kebiasaan ini anak tidak jarang mengalami kemerosotan moral, karena dalam pergaulannya dengan orang lain yang terpengaruh kepada hal-hal yang kurang wajar.

2) Tertanamnya kebencian pada diri anak

⁸⁵ Baiq Ety Astriana, "Dampak Poligami Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah", *Jurnal El-Hikmah*, Vol. 6, No 2, Desember 2012, h. 41-43

Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya "ternodai" karena ayahnya berpoligami. Walaupun mereka sangat memahami bahwa poligami dibolehkan (sebagaimana dalam QS An- Nisa (4): 3) tapi mereka tidak mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan. Apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya. Kekecewaan seorang anak karena merasa dikhianati akan cintanya dengan ibunya oleh sang ayah akan menyebabkan anak tidak simpati dan tidak menghormati ayah kandungnya.

3) Tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak.

Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari poligami adalah adanya krisis kepercayaan dari keluarga, anak, dan isteri. Apalagi bila poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada. Sesungguhnya poligami bukan sesuatu yang harus dirahasiakan tapi sesuatu yang sejatinya harus didiskusikan, jadi jangan ada dusta di antara suami, istri, dan anak. Dan jika saat itu muncul anaklah yang paling pertama mendapat dampaknya, karena yang anak tau hanya keluarga yang harmonis dan anak merasa dibohongi sehingga mengakibatkan timbul ketidakpercayaan pada dirinya sendiri dan jika dialami terus menerus anak akan merasa curiga dan tidak mempunyai rasa kepercayaan terhadap siapapun.

4) Timbulnya traumatik bagi anak

Dengan adanya tindakan poligami seorang ayah maka akan memicu ketidak harmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan. Walaupun tidak sampai cerai tetapi kemudian akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak menjadi agak trauma terhadap perkawinan.

Interaksi sosial dalam keluarga yang berpoligami dapat berjalan dengan baik dan harmonis apabila seorang suami dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan sebaik-baiknya. Perkawinan poligami juga akan berjalan lancar jika dilakukan secara terbuka, jujur, tidak sembunyi-sembunyi, adanya persetujuan istri, serta adanya nilai-nilai dan motivasi agama yang mempengaruhi dalam menjalankan keluarga poligami. Konflik yang biasanya muncul dalam keluarga yang berpoligami adalah adanya kecemburuan antara sesama istri dan tidak adilnya seorang suami dalam membagi tanggung jawabnya. Akibat dari permasalahan ini interaksi antara anggota-anggota keluarga baik antara suami dan istri, antara sesama istri dan antara orang tua dengan anak akan terganggu.

D. Maqashid Syari'ah

1. Pengertian

Secara etimologi, *maqāsid syarī'ah* merupakan gabungan dari dua kata: *al-maqāsid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāsid* adalah bentuk plural dari *maqṣud*, *qāṣd*, *maqṣd* atau *qūṣūd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.⁸⁶ *Syarī'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syarī'ah* secara terminologi adalah *al-nuṣūṣ al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawâtir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syarī'ah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.⁸⁷

Secara terminologi, *al-maqāsid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh

⁸⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāsid al-Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 178-179.

⁸⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

pembuat Syariah (Allah swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama' mujtahid dari teks-teks *syarī'ah*.⁸⁸

Al-Syathibi membagi *maqāṣid* menjadi dua: tujuan Allah (*qaṣḍu al-syārī'*) dan tujuan mukallaf (*qaṣḍu al-mukallaf*). Tujuan Allah (*qaṣḍu al-Syārī'*) terbagi menjadi empat bagian: Pertama; *qaṣḍu al-syār'i fī waḍ'i al-syarī'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum). Kedua; *qaṣḍu al-syār'i fī waḍ'i al-syarī'ah li al-ifhām* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami). Ketiga; *qaṣḍu al-syār'i fī waḍ'i al-syarī'ah li al-taklīf bi muqtaḍāha* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya). Keempat; *qaṣḍu al-syār'i fī dukhūli al-mukallaf tahta ahkāmī al-syarī'ah* (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum syarī'ah). Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (*qaṣḍu al-mukallaf*) Syathibi hanya membahas beberapa masalah saja.

Sementara Muhammad Thohir Ibnu Ashur membagi *al-maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dua dan mendefinisikan keduanya: pertama, *al-maqāṣid al-tasyri' al-'ammah* adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. Kedua, *al-maqāṣid al-khaṣah* adalah cara-cara yang dikehendaki syarī' untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus.⁸⁹

Berdasarkan dua definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Al-maqāṣid al-syarī'ah* bisa berupa *al-maqāṣid al-'ammah*, yang meliputi keseluruhan aspek syariat dan *maqāṣid al-khaṣah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqāṣid al-syarī'ah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan

⁸⁸ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, (Herndon: IIIT, 2007), h. 15.

⁸⁹ Al Raisuni, Ahmad, *Nadhariyat al Maqashid'Inda al Imam al Shatibi*, (Beirut: Al Muassasat al Jam'iyat, 1992), h. 14

lain-lain, atau maqasid *syarī'ah al juz'iyah* yang meliputi setiap hukum *syara'* seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.⁹⁰

2. Konsep Maqasid Syariah menurut Ibnu Ashur

Tahap pertama Ibnu Ashur membagi *maqāsid al-syarī'ah* menjadi dua bagian yaitu *maqāsid al-'ammah* dan *maqāsid al-khaṣah*. Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan maqasid yaitu dengan fitrah, masalah, dan ta'lil. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori maqasid dengan tiga cara yaitu melalui *al Maqam, Istiqra'* (induksi), dan membedakan antara *wasail* dan *maqasid*. Tujuan umum (*maqāsid al-'ammah*) *syarī'ah* dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah swt dan takut kepada-Nya serta tawakkal dan menyerahkan segala urusan kepadaNya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan.⁹¹ Menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya.

92

Selanjutnya Ibnu Ashur membatasi *maqāsid al-'ammah* dengan empat syarat yaitu pertama bersifat tetap (*al-tubut*). Kedua, jelas (*al-zuhur*), yaitu bersifat jelas tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah. Ketiga, terukur (*indibaṭ*), yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan dishariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk. Keempat, otentik (*i'trad*), yaitu jika suatu tujuan *syara'* tidak diperdebatkan karena

⁹⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 183

⁹¹ Muhammad Bakr Ismail Habib, *Maqashid al Islamiyah Ta'silan wa Taf'ilan*. (Makkah: Dar al Tibah al Khadra', 2006), h. 224

⁹² Muhammad 'Abd. Al 'Ati Muhammad 'Ali, *Al Maqashid al Shar'iyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*. (Kairo: Dar al Hadith, 2007), h. 117

perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadanan dalam pergaulan suami istri.⁹³

Setiap tujuan *syari'ah* secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Maslahat menurut istilah Ibnu Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi).⁹⁴

Ibnu Ashur membagi maslahat yang menjadi *maqsud* (tujuan) dalam *syara'* menjadi empat bagian sebagai berikut:

a) Maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat

Maslahat terbagi menjadi *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. *Maslahat daruriyat* adalah masyarakat harus mendapatkan kemaslahatan ini baik secara kelompok maupun individu. Yang mana, suatu tatanan masyarakat tidak akan tegak dengan hilangnya kedaruratan itu, dan keadaan manusia akan menjadi rusak seperti binatang. Maslahat ini kembali pada kulliyat al khamsah.

Kulliyat ini tergambar dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan nasab.⁹⁵ Sedangkan maslahat al hajiyyat adalah maslahat yang dibutuhkan oleh umat untuk menegakkan aturannya dengan baik, jika maslahat ini hilang tatanan kehidupan tidak menjadi rusak akan tetapi berada dalam keadaan tidak teratur. Contoh dari *maṣlahat al-hajiyyat* adalah menjaga kehormatan.⁹⁶ *Maṣlahat tahsiniyah* adalah dengan maslahat itu kesempurnaan keteraturan umat dapat terealisasi. *Maṣlahat* ini merupakan sebab umat lain tertarik untuk berinteraksi dengan umat Islam. Contohnya adalah akhlak yang mulia.⁹⁷

b) Maslahat dilihat dari segi hubungannya dengan umat

⁹³ *Ibid*, h. 233

⁹⁴ Muhammad Tahir Ibnu Ashur. *Maqashidal Syariah*. (Yordania: Dar al Nafais, 2001), h.

⁹⁵ *Ibid*, h. 80

⁹⁶ *Ibid*, h. 84

⁹⁷ *Ibid*, h. 85

Secara umum, kelompok, atau individu *Maṣlahat* dilihat dari segi ini terbagi menjadi dua yaitu *maṣlahat al kulliyah*, dan *maṣlahat juz'iyah*. *maṣlahat al-kulliyah* adalah maslahat yang kembali kepada umat secara umum dan kelompok besar dari suatu umat seperti penduduk suatu daerah. Contoh maslahat ini seperti menjaga kelompok dalam masyarakat dari perpecahan, dengan *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. *Maslahat juz'iyat* adalah kemaslahatan bagi individu (pribadi) atau beberapa individu, yang harus dijaga dalam hukum-hukum muamalah.⁹⁸

- c) Maslahat dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan
 - 1) *Maṣlahat qat'iyah*, maslahat ini diketahui dengan adanya teks secara pasti didukung oleh teori induksi atau dengan dalil akal bahwa dalam implementasinya terdapat kebaikan yang besar atau dalam pelaksanaan hal yang sebaliknya akan terjadi bahaya yang besar, seperti membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa Khalifah Abi Bakr as Sidiq.
 - 2) *Maṣlahat ḥazaniyyah*, yaitu maslahat yang bisa diketahui dengan persangkaan akal sehat seperti memelihara anjing untuk menjaga rumah di saat situasi mencekam, dan ada kalanya ditunjukkan oleh dalil dzanny seperti sabda Nabi SAW: *La yaqdi al qadi wa huwa ghadban* (seorang hakim jangan memutuskan perkara ketika ia dalam keadaan marah).
 - 3) *Maṣlahat Wahmiyyah*, adalah diandaikan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, akan tetapi setelah dicermati kemaslahatan itu berubah menjadi kerusakan. Seperti mengkonsumsi narkoba.⁹⁹

Ibnu 'Asyur membagi tingkatan *maqāṣid* menjadi dua yaitu tujuan syari' dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan-tujuan ini diantaranya ada yang berhubungan dengan hak Allah, dengan hak hamba,

⁹⁸ *Ibid*, h. 89-90

⁹⁹ Ismail Al Hasani, *Nadzariyat al-Maqashid'Inda al Imam Muhammad al Thahir bin 'Ashur*. (Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami, 1995), h. 241

gabungan antara dua hak yaitu hak Allah dan hak hamba.

- a. Hak-hak Allah Yang dimaksud dengan hak Allah adalah hak-hak yang menjaga tujuan umum Syariah, seperti hak baitul mal, dan hak orang yang meng-qasar, dan hak *haqdanah*. Hak-hak ini karena bisa mendatangkan kemanfaatan secara umum, maka dinisbatkan kepada Allah dan seseorang tidak berhak untuk menggugurkannya.
- b. Hak-hak hamba, yang dimaksud dengan hak hamba adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan bagi dirinya sesuatu yang pantas atau mencegah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya *maṣlahah* secara umum ataupun mendatangkan kerusakan secara umum.
- c. Percampuran antara hak Allah dan hak hamba Contoh percampuran ini adalah qishah, qadzaf, pemerkosaan, seperti contoh di atas hak Allah SWT mendominasi secara mayoritas, dan terkadang hak hamba mendominasi, ketika tidak mungkin dibarengkan dengan hak Allah swt, seperti pengampunan dari pihak yang terbunuh terhadap pembunuhnya secara sengaja.¹⁰⁰

3. Konsep Maqashid Al-Syatibi

Sebelum menjelaskan tentang *maqāshid al-syari'ah*, Syathibi terlebih dahulu menjelaskan tentang *ta'fīl al-syari'ah* (illat dishariatkannya hukum). Menurutny bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba. *Ta'fīl* (adanya illat hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci.

Maqāshid al-syari'ah telah secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan dari ini oleh sejumlah ilmuwan. Semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan masalahah (*jalb al-maṣālih*)

¹⁰⁰ Muhammad Tahir Ibnu Ashur. *Maqashidal Syariah...* h. 155-156

dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (*daf'u al-mafāsīd / dar'u al-mafāsīd*).

Al-Syatibi tidak menjelaskan definisi *maqāshid al-syari'ah* dalam bukunya, ia langsung menjelaskan detail isi *maqāshid al-syari'ah* dari pembagiannya. Syatibi membagi *maqāshid* menjadi dua, *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf).¹⁰¹ Kemudian ia membagi *qashdu syari'* menjadi empat macam. Pertama, *qashdu al-syari' fī waḍ'i al-syari'ah*; kedua, *qashdu al-syari' fī waḍ'i al-syari'ah li al-ifhām*; ketiga, *qashdu al-syari' fī waḍ'i al-syari'ah li al-taklīf bi muqtaḍahā*; keempat, *qashdu al-syari' fī dukhūli al-mukallaf tahta ahkāmi al-syari'ah*. Sedangkan bagian *qashdu al-mukallaf*, Syatibi tidak menyebutkan macam-macamnya.¹⁰²

Selanjutnya akan dijelaskan macam-macam dari *qashdu al-syari'* satu persatu. Macam pertama adalah *qashdu al-syari' fi waḍ'i al-syari'ah* (tujuan Tuhan meletakkan syariah). Maksud Allah menetapkan syariah tidak lain guna kepentingan masalah hamba-Nya. Syatibi membagi masalah tersebut menjadi tiga derajat be urutan dari kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: *ḍaruriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. *Ḍaruriyyah* memegang derajat masalah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi masalah *ḍaruriyyah* -nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan masalah *ḍaruriyyah* yang hilang.¹⁰³ *Maṣlahah ḍaruriyyah* dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta, dan akal. Contoh dari menjaga agama ialah mendirikan rukun iman dan Islam.¹⁰⁴

Maṣlahah setelah *ḍaruriyyah* adalah *maṣlahah hajjiyyah*. *Maṣlahah hajjiyyah* merupakan *maṣlahah* yang bersifat memudahkan, menghindarkan

¹⁰¹ Mukallaf berarti dibebani. Maksud dibebani di sini adalah bahwa tiap orang memegang kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan, paling tidak berkewajiban atas dirinya

¹⁰² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqat fī Uṣuli al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Kotob AlIlmiyah, 2004), h. 219

¹⁰³ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: IIIT, 1995), h. 145-146

¹⁰⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fī Ushuli al-Syariah*, h. 221

manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan *maṣlahah hajjiyyah* tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat.¹⁰⁵ Contoh *maqāṣid hajjiyyah* adalah rukhsah dalam ibadah, dan jual beli salam dalam muamalat.¹⁰⁶ Terakhir adalah *maṣlahah tahsiniyyah*. *Maṣlahah tahsiniyyah* ialah pelengkap atau penyempurna dari dua maqashid sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.¹⁰⁷ Salah satu dari *maṣlahah tahsiniyyah* adalah larangan membunuh wanita dan anak kecil dalam peperangan.

Kedua, *qāṣdu al-syārī‘ fi waḍ‘i al-syarī‘ah li al-ifhām* atau maksud Tuhan meletakkan syariat agar dipahami. Maksud dari jenis maqashid ini adalah bahwa Allah menurunkan syariat agar dipahami hamba-Nya. Allah menurunkan alQur’an dengan Bahasa Arab, maka yang bisa menjelaskan kepada seluruh umat Islam di dunia adalah orang Arab. Dalam buku *Nadhariyyatu al-Maqāṣidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi*, Raisuni meringkas lima pokok masalah dalam *qāṣdu al-syārī‘ fi waḍ‘i al-syarī‘ah li al-ifhām* menjadi dua poin. Poin tersebut ialah syariat ditetapkan dengan Bahasa Arab dan syariat ditetapkan sesuai dengan umat. Maksud dari poin pertama adalah bahwa syariat diturunkan dengan Bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus memahami Bahasa Arab. Poin kedua berarti bahwa syariat memahami kondisi umat, maka ia diturunkan sesuai kondisi umat tersebut.¹⁰⁸

Ketiga, *qāṣdu al-syārī‘ fi waḍ‘i al-syarī‘ah li al-taklīf bi muqtaḍaha* yang berarti maksud Tuhan meletakkan syariat untuk memberi beban/tanggungjawab pada hamba-Nya. Dalam *qāṣdu al-syārī‘ fi waḍ‘i al-syarī‘ah li al-taklīf bi muqtaḍaha*, Syatibi menulis dua belas masalah mengenainya, masalah tersebut dapat dipersingkat menjadi dua masalah.¹⁰⁹ Pertama, *al-taklīf bimā lā yuṭāqu*, pembebanan diluar

¹⁰⁵ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi*, 146

¹⁰⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, h. 222-223

¹⁰⁷ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi*, h. 146

¹⁰⁸ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi ...*, h. 149

¹⁰⁹ Moh. Toriquddin, “Teori Maqāshid Syarī‘ah Perspektif Al-Syatibi”, h. 36

kemampuan hamba dan kedua, *al-taklīf bimā fīhi masyaqqah* pembebanan yang mana di dalamnya terdapat kesulitan. Dalam masalah pertama, Syatibi menjelaskan bahwa Allah memberlakukan syariat pada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidak mampu menanggungnya, Allah tidak akan membebaskan syariat terhadap hamba-Nya.¹¹⁰ Kedua, Allah akan meringankan beban bagi hamba-Nya jika dalam taklif terdapat kesulitan. Contohnya seperti rukhsah sholat jama' bagi musafir.¹¹¹

Keempat, *qaṣḍu al-syārī' fī dukhūli al-mukallaf tahta ahkāmī al-syārī'ah* berarti maksud tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat. Syatibi membahas hal ini ke dalam dua puluh masalah.¹¹² Menurut Raisuni pembahasan utama terletak pada masalah kedelapan hingga enam belas. Syatibi menjelaskan bahwa Allah tidak memberlakukan pengecualian bagi hamba-Nya dalam masalah *al-taklīf*. Semua umat Islam memiliki tanggungan untuk melaksanakan syariat Islam, meskipun tinggal di waktu, tempat dan kondisi yang berbeda.¹¹³

Metode Penentuan Maqashid Menurut Al-Syatibi

1. Analisa Lafadz *al-Amr* dan *al-Nahyu*

Lafadz *al-amr* dan *al-nahyu* menjadi salah satu metode penentuan maqashid karenanya memiliki peranan penting dalam Bahasa Arab. *Al-amr* dan *al-nahyu* merupakan dua pembahasan dalam *uṣul lugawī* dalam hal permintaan. *Al-amr* adalah permintaan atas suatu perbuatan dan *al-nahyu* adalah permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Analisa lafadz *al-amr* dan *al-nahyu* dilihat dari dua hal yaitu: *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi* dan memperhatikan konteks illah dari setiap perintah dan larangan.¹¹⁴

¹¹⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fī Ushuli al-Syariah*, h. 281

¹¹¹ Ibid, h. 288

¹¹² Moh. Toriquddin, "Teori Maqâsîd Syarī'ah Perspektif Al-Syatibi", 37

¹¹³ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, h. 164-165

¹¹⁴ Ibid, h. 296

Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi berarti melihat suatu perintah dan larangan dalam dalil secara eksplisit, dan eksistensi keduanya ada secara mandiri (*ibtidai'i*). Contohnya surat Al-Jumu'ah ayat 9: "...maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli".

Ayat tersebut terlihat jelas terdapat perintah dan larangan di dalamnya tanpa harus menganalisa ayat secara mendalam. Perintah dan larangan yang tertulis adalah perintah untuk segera mengingat Allah (shalat jum'at) dan larang berjualan (saat sholat jum'at).¹¹⁵

Sedangkan memperhatikan konteks illah dari setiap perintah dan larangan berarti perintah dan larangan yang ada dalam dalil tidak terlihat secara eksplisit namun harus dipahami lebih mendalam terlebih dahulu. Contohnya seperti dalam dalil mengenai perintah shalat: "dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk". Perintah yang terlihat secara eksplisit dalam ayat tersebut adalah perintah shalat padahal di dalamnya juga mengandung perintah implisit, yaitu perintah bersuci. Bersuci merupakan illah dari shalat, jika shalat diperintahkan maka bersuci juga diperintahkan meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam dalil.¹¹⁶

2. Memperhatikan Maqashid Turunan (*at tabi'ah*)

Maksud dari maqashid turunan atau *at tabi'ah* adalah *maqāṣid* yang muncul turunan dari maqashid awalnya. Contohnya nikah dengan maqashid awalnya menyambung keturunan, sedangkan maqashid turunan dari nikah adalah berbagi tempat tinggal, saling membantu dalam masalah dunia dan akhirat, menjaga syahwat dan lain sebagainya. Semua itu adalah maqashid nikah yang disyariatkan

¹¹⁵ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi* 'Inda al-Imam al-Syatibi, h. 298

¹¹⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, h. 393

Allah. Sebagian maqashid termaktub dalam nash dan sebagian lainnya diambil dari dalil lainnya.¹¹⁷

3. Menganalisa *sukūt al-syari'*

Maksud dari menganalisa *sukūt al-syari'* adalah menganalisa hal-hal yang tidak disebutkan atau diterangkan dalam nash oleh *al-syari'*. Jika terdapat perkara yang terjadi namun tidak ada keterangan mengenai hal tersebut tidak serta-merta hal tersebut dikatakan tidak boleh atau tidak dikerjakan karena sesungguhnya hal inilah yang membuka pintu ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan mudharat di dalamnya. Jika terkandung masalah, maka perkara tersebut dapat dilakukan. Sedangkan jika terindikasi adanya mudharat di dalamnya, maka perkara tersebut tidak boleh dilakukan. Pendekatan yang digunakan untuk ijtihad ini adalah pendekatan masalah mursalah.¹¹⁸

4. *Istiqra'*

Syatibi berpendapat bahwa *istiqra'* merupakan metode yang paling utama untuk mengetahui *maqāsid syari'ah*.¹¹⁹ *Istiqra'* adalah metode induktif yang digunakan untuk menentukan *maqāsid* yang khusus dari yang umum. Jika *maqāsid* khusus bertentangan dengan maqashid umum, maka *istiqra'* tidak dianggap benar dalam tersebut.¹²⁰ Contoh dari *istiqra'* adalah bolehnya jual beli online yang dikhususkan dari dibolehkannya jual-beli dalam qur'an: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

¹¹⁷ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, h. 300

¹¹⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, h. 393

¹¹⁹ Maher Hamid al-Hauli, *al-Istiqrā' wa Dauruhu fi Ma'rifati Maqashid al-Syari' 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Ghaza: al-Jamiah al-Islamiyyah, 2010), h. 18

¹²⁰ Nu'man Jughaim, *Thuruq al-Kasyfi 'an Maqashid al-Syari'ah*, (Yordania: Dar Alnafaes, 2014), h. 252

E. Masalah Mursalah

1. Pengertian

Maṣlahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*.¹²¹ Kata *maṣlahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ - يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹²² Kata *maṣlahah* disebut juga dengan (الْمُسْتَصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik.¹²³

Sedangkan kata *mursalah* adalah *isim maf'ul* dari *fi'il madhi* dalam bentuk *ṣulasi*, yaitu (رَسَلَ), dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلَ) secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”¹²⁴

Perpaduan dua kata menjadi “*maṣlahah mursalah*” yang berarti prinsip kemashlahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Dan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *maṣlahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya.¹²⁵ Di antara definisi tersebut:

- a. Al-Ghazali merumuskan pengertian *maṣlahah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

¹²¹ Sebagian ulama menyebut *maṣlahah mursalah* dengan istilah *al-Munasib al-Mursal* (dipopulerkan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi), *al-Istidlal al-Mursal* (dipopulerkan oleh Asy-Syatibi) dan *al-Ishtislah* (dipopulerkan oleh al-Ghazali). Lihat Rahmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 118.

¹²² Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.

¹²³ Abdul Wahab Khalaf, *Maṣdar al-Tasyri' al-Islami Fi ma La Nassa Fih*, Cet. III, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), h. 85.

¹²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 332.

¹²⁵ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-I*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 121-122.

“Apa-apa (masalah) yang tidak bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”¹²⁶

- b. Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* yang memberikan definisi:

الْمَنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ الْعَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

“Maslahah yang tidak diketahui apakah syar’i menolaknya atau memperhitungkannya”.¹²⁷

- c. Ibnu Qudamah dari ulama Hambali merumuskan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

“Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya”.¹²⁸

- d. Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan berikut:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لَالْعَاءِهَا

“Maslahah mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau mengakuinya”.¹²⁹

- e. Muhammad Abu Zahra memberikan definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din di atas yaitu:

الْمَصَالِحُ الْمَلَاءِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ بِالْعَاءِ

“Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya”.¹³⁰

- f. Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-I’tisham* mendefinisikan masalah mursalah adalah suatu muslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *daruriyyah* (primer) maupun *hajiyyah* (sekunder).¹³¹

¹²⁶ Abu Hamid al-Ghazālī, *Al-Mustasyfā fī ‘Ilm al-Ushūl* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1993), h. 311

¹²⁷ Asyaukani, *Irsyād al-Fuhūl* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1994), h. 54

¹²⁸ *Ibid.*, h. 333.

¹²⁹ Abdul Wāhab Khalāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr, 1996), h. 80.

¹³⁰ Muhammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1957), h. 278.

¹³¹ Abu Ishak Asy-Syatibi, *Al-I’tisham Jilid II*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975), h. 39.

- g. ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam mengatakan bahwa *maslahah* itu identik dengan sebuah *al-nafi‘* (kemanfaatan), *al-khair* (kebajikan), *al-hasn* (kebaikan).¹³² Sementara Najm al-Din al-Tufi mengatakan bahwa makna *maslahah* dapat dilihat dalam segi ‘*urfi* maupun *syar‘i*. Al-Tufi menjelaskan makna dari ‘*urfi* dalam *maslahah* adalah sebab yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, dan perumpamaannya bagaikan perniagaan yang merupakan mendatangkan keuntungan. Sedang dalam makna *syar‘i*, *maslahah* merupakan sebab yang mengantarkan kepada tujuan *al-syari‘*, baik yang menyangkut ibadah ataupun muamalah.¹³³ Ia menegaskan bahwa *maslahah* masuk dalam cakupan *maqasid al-syari‘ah*.¹³⁴

Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar *maṣlahah* yang peruntukkan kepada kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*‘adalah*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Sejatinya setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah termasuk bagian dari syariat Islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syariat Islam.¹³⁵ Dalam perkembangan kehidupan manusia perwujudan syariat Islam dalam hukum-hukum digerakkan oleh ruh *maṣlahah*. Keberadaan *maṣlahah* dalam syariat Islam memang tidak bisa pisahkan karena *maṣlahah* dan syariat merupakan kedua hal yang wajib menyatu, sehingga kehadiran *maṣlahah* menghendaknyakan adanya tuntutan syariat. Berbagai riset dan penelitian mengenai nas al-Qur’an dan hadis menyimpulkan bahwa hadirnya hukum syariat memiliki hikmah dan ‘*illah*

¹³² *Ibid.*, h.416-417

¹³³ Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz ke-1, (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), h.5.

¹³⁴ Hamadi al-‘Ubaidi, *Ibn Rusyd wa ‘Ulum al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar alFikr al-‘Arabiyy, 1991), h.97.

¹³⁵ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Juz ke-3, (Kairo: Dar alHadits, 1425 H/2004 M), h.5.

yang menghantarkan kepada sebuah *maṣlahah*.¹³⁶ Bahkan, hukum-hukum yang dimaksud bukan hanya hukum dalam bidang muamalat umum saja, tetapi juga mencakup ibadah mahdah.

Pembahasan mengenai teori *maṣlahah* tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai *al-qawā'id al-syar'iyah* yang bertumpu pada penggalan hikmah dan 'illah yang merupakan inti dari sebuah *maṣlahah* juga. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa masalah adalah intisari dari formulasi *al-ahkām al-syar'iyah* dan *al-qawā'id al-syar'iyah*.¹³⁷

Perwujudan sebuah *maṣlahah* dalam syariat Islam merupakan suatu keniscayaan. Dalam setiap hukumnya, kemaslahatan berperan dalam menghadirkan kebaikan atau kemanfaatan dan menjauhkan dari keburukan atau kerusakan, dengan tujuan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan serta kemurnian pengabdian kepada Allah di muka bumi. Karena, pada dasarnya sebuah *maṣlahah* hadir dalam rangka menjaga tujuan-tujuan Syara' yaitu berupa kebaikan dan kemanfaatan, dan bukan dari hawa nafsu manusia.¹³⁸ Dalam menggali sebuah masalah juga tidak dapat keluar dari dikandung teks-teks syariah (*nuṣūṣ al-syari'ah*). Oleh sebab itu, pendapat yang mengatakan bahwa sebuah *maṣlahah* hendaknya diprioritaskan apabila bertentangan dengan teks syariah merupakan pendapat yang keliru.¹³⁹ Karena pada hakikatnya *maṣlahah* merupakan akar yang tidak bisa dipisahkan dari peredaran dan perubahan hukum Islam, karena interpretasi teks syariah hendaknya bertumpu padanya.¹⁴⁰

Berdasarkan ilmu *uṣul* terkenal istilah *ijtihad istiṣlāhiy* yaitu upaya dalam mengambil kesimpulan hukum syara' melalui penerapan prinsip-

¹³⁶ Tahir ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Salam, 1427 H/2006 M), h.12.

¹³⁷ 'Allal al-Fasiy, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyyah, t.th.), h.138.

¹³⁸ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, (t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M), h.12 -13.

¹³⁹ Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h.607. Lihat juga Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989), h.94-96.

¹⁴⁰ Inilah yang disebut-oleh 'Ali Hasaballah-dengan *Qiyas al-Maslahah*. Lihat 'Aliy Hasaballah, *Uṣul al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1383 H/1964 M), h.257.

prinsip hukum yang bersifat universal terhadap suatu masalah dimana masalah tersebut tidak terdapat dalam nas al-Qur'an maupun Hadis secara konkret juga tidak terdapat *Ijma'* ulama, dengan tujuan mewujudkan niali *maṣlahah* (*jalb al- maṣlahah*) dan menolak *mafsadah* (*daf'u al-mafsadah*). Metode *ijtihad* ini pada dasarnya mengarah kepada hukum yang dimasukkan kedalam cakupan sebuah nas.¹⁴¹

Pembagian hukum syariat terdapat 2 (dua) kategori hukum. *Pertama*, hukum yang bersumber pada nas al-Qur'an dan Hadis secara langsung¹⁴². *Kedua*, hukum yang bersumber pada *ijtihad*, yaitu yang tidak secara langsung diambil dari nas al-Qur'an dan hadis. Jenis hukum inilah yang merupakan hukum yang dibentuk dalam fondasi *maṣlahah*. Walaupun demikian kedua kategori hukum tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan sebuah *maṣlahah*; dan sifat dari *maṣlahah* itu sendiri terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan banyak faktor lainnya. Hal ini mengartikan bahwa sebuah *maṣlahah* yang tidak secara konkret dan tegas terdapat dalam sebuah nas terbuka untuk berubah dan berkembang dengan tetap memperhatikan rasionalitas dan keadaan nyata masalah tersebut.¹⁴³

2. Pembagian Maslahah

Membicarakan *al-maṣlahah* sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' (*syahadah asy-syar'i*) terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui/melegitimasinya sebagai *al- maṣlahah* ataupun tidak. Dalam hal jumhur ulama membagi *al- maṣlahah* kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

¹⁴¹ Muhammad Sallam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M), h.45.

¹⁴² Lebih jauh mengenai kedudukan Sunnah/Hadis sebagai sumber legislasi hukum Islam, lihat Mustafa Hasaniy al-Siba'iy, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Damaskus: al-Dar al-Qaumiyyah, 1379 H/1960 M), h.343-352.

¹⁴³ Bustami Muhammad Sa'id, *Maḥmud Tajdid al-Din*, (Kuwait: Dar al-Da'wah, 1405 H/1984 M), h.260-261.

- a. *Al-maṣlahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya (*mā syahid asy-syar' li i'tibariha*)

Maṣlahah dalam bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam *al-qiyas* (analogi), karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *al-maṣlahah*) dalam pembahasan *qiyas*. *Maṣlahah* ini biasa disebut dengan istilah *al-maṣlahah al-mu'tabarah*. Semua ulama sepakat menyatakan, *maṣlahah* ini merupakan hujjah (landasan hukum). Sebagai contoh, meng-*qiyas*-kan keharaman perahan kurma yang memabukkan yang tidak terdapat *nash*-nya, kepada keharaman perahan anggur yang memabukkan yang ada *nash*-nya di dalam al-Qur'an maupun sunnah.

- b. *Al-maṣlahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya/menolaknya (*ma syahid asy-syar' li buthlaniha*)

Al-maṣlahah kedua ini adalah *baṭil*, dalam arti dapat dijadikan sebagai hujjah karena ia bertentangan dengan *mash*. Bentuk *maṣlahah* yang kedua ini biasa disebut dengan *al-maṣlahah al-mulghah*. Sebagai contoh, dahulu pernah seorang ulama mengeluarkan fatwa, bahwa terhadap seorang raja yang kaya melakukan hubungan suami isteri pada siang bulan Ramadhan dikenakan kifaratus puasa dua bulan berturut-turut, tanpaboleh memilih antara memerdekakan hamba, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau member makan enam puluh orang miskin. Dasar pemikirannya ialah kifaratus disyariatkan untuk menimbulkan efek jera bagi orang yang melakukan pelanggaran dalam ibadah.

- c. *Al-maṣlahah* yang tidak terdapat kesaksian syara', baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk *nash* tertentu (*ma lam yasyhad asy-syar' la libuṭlaniha wa la fii'tibariha naṣ mu'ayyan*)

Al-maṣlahah bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi kepada dua macam, yaitu sebagai berikut:

a) *Al-Maṣlahah al-Ghāribah*

Yaitu *maṣlahah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam/*species* ataupun jenis/*genus* tindakan syara' (*nau'aw*

jins taṣarufat asy-Syar'ī). Dalam kenyataan, *maṣlahah* bentuk ini hanya ada dalam teori, tetapi tidak ditemukan contohnya dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.

b) *Al-Maṣlahah al-Mula'imah*

Yaitu *al-maṣlahah* yang meskipun tidak terdapat *naṣ* tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkungan yang umum (*al-uṣul al-khamsah*). Tujuan syara' ini dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam Al-Qur'an, hadis, dan al-Ijma'. *Maṣlahah* inilah yang biasa disebut dengan istilah *al-maṣlahah al-mursalah*.¹⁴⁴

Menurut pendapat al-Ghazali berdasarkan kekuatannya *maṣlahah* dikategorikan menjadi tiga, yaitu (1) *maṣlahah mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penerimaannya; (2) *maṣlahah mulgah* yaitu *maṣlahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penolakannya; dan (3) *maṣlahah mursalah*, yaitu *maṣlahah* yang tidak mendapatkan ketegasan justifikasi Syara', baik pada penerimaannya maupun penolakannya.¹⁴⁵ Atas pendapat tersebut Muhammad Muslehuddin berpandangan bahwa dalam kajian *maṣlahah* tetap hendaknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum dan realitas kehidupan sosial yang terus berdinamika sehingga menuntut bergerak hukum Islam sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi, sehingga nilai-nilai pokok dalam hukum Islam tetap dapat dipertahankan.¹⁴⁶

Berdasarkan kekuatan *maṣlahah* al-Ghazali mengkategorisasi *maṣlahah* menjadi tiga, yaitu (1) *maṣlahah* dengan level yang mendesak (*darurat*), (2) *maṣlahah* dengan level kebutuhan sekunder (*hajat*), dan (3) *maṣlahah* dengan level kebutuhan tersier (*tahsiniyat/tazyinat*). Masing-masing bagian disertai oleh *maṣlahah* penyempurna/pelengkap

¹⁴⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 206-209.

¹⁴⁵ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, h.414.

¹⁴⁶ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), h.160.

(*takmilah/tatimmah*). Pemeliharaan yang berada pada tingkat level *darurat* merupakan level paling kuat dari *maṣlahah* dalam pemeliharaan *al-usul al-khamsah*. Teori *al-usul al-khamsah* ini kemudian disempurnakan lagi oleh Syihab al-Din al-Qarafi dengan menambahkan satu prinsip dasar yaitu memelihara kehormatan diri (*hifz al-'ird*) walaupun al-Qarafi sendiri mengakui bahwa ini masih menjadi polemik diantara ulama.¹⁴⁷

Sedangkan 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam mengkategorikan *maṣlahah* menjadi tiga macam, yaitu (1) *maṣalih al-mubahat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya boleh (2) *maṣalih al-mandubat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya sunah dan (3) *maṣalih al-wajibat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya wajib. Sedangkan *mafsadah* dikategorikan menjadi dua macam, yaitu (1) *mafāsīd al-makruhat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya makruh dan (2) *mafāsīd al-muharramat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya haram.¹⁴⁸ Selain itu, al-'Izz ibn 'Abd al-Salam juga mengkategorikan *maṣlahah* menjadi dua macam, yaitu (1) *maṣlahah haqiqiy* dalam arti denotatif yaitu kesenangan dan kenikmatan, dan (2) *maṣlahah majaziy* dalam arti konotatif yaitu media yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan dan kenikmatan. Karena *maṣlahah* dapat diantarkan melalui media *mafsadah*, sehingga *mafsadah* ini dibolehkan bahkan diperintahkan, bukan karena bersifat *mafsadah*, tetapi sebagai media penghantar menuju sebuah *maṣlahah*.¹⁴⁹

3. Syarat-Syarat menggunakan Maslahah Mursalah

Ulama' bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan masalah mursalah sebagai hujjah, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu,

¹⁴⁷ 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Ali ibn Rabi'ah, *Ilm Maqasid al-Syari'*, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al- Wataniyyah, 1423 H/2002), h.63.

¹⁴⁸ 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Jail, 1400 H/1980 M), Juz ke-1, h.9.

¹⁴⁹ *Ibid.*, h.14.

ulama menyusun syarat-syarat masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

- a. *Maṣlahah* yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika *maṣlahah* itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung *maṣlahah*, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.¹⁵⁰
- b. *Maṣlahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Contohnya: dengan diaturnya setiap perkawinan harus dicatatkan, maka akan menghasilkan kepastian hukum terhadap hak-hak suami, istri dan anak jika terjadi permasalahan setelah adanya perkawinan hal ini lah yang disebut dengan *maṣlahah*.
- c. *Maṣlahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
- d. *Maṣlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.¹⁵¹

¹⁵⁰ Chairul Umam, ..., h. 137.

¹⁵¹ Amir Syarifudin, ..., h. 337.

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemashlahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:¹⁵²

- a. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan syara'.
- b. *Maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan nash syara'.
- c. *Maṣlahah* itu termasuk dalam kategori *maṣlahah* yang *daruriyyat*, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak.

4. Dalil Kehujjahan *Maṣlahah mursalah*

Menurut ulama' terkemuka, bahwa *maṣlahah mursalah* itu merupakan *hujjah syari'ah*. Di atasnya itu dibina syariat hukum. Masalah-masalah yang tidak diatur oleh hukum, baik yang berdasarkan nash, ataupun ijmak, qiyas, dalam hal ini orang mensyariatkan hukum yang mengatur *maṣlahah* ialah mutlak. Tidak menghentikan *tasyri'* hukum dibina di atas *maṣlahah* ini untuk mengadakan saksi *tasyri'* dengan penjelasannya. Dalil-dalil yang dikemukakan orang dalam masalah ini ada dua:

Pertama, memperbaharui kemashlahatan masyarakat dan tidak mengadakan larangan-larangan. Kalau tidak disyariatkan hukum maka dengan apa orang akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan, mengembangkan, dan mempersempit ruang *tasyri'* terhadap kemashlahatan yang difikirkan oleh *syar'i*. Untuk memelihara keselamatan orang menurut perkembangan masa. Mengenai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul. Mendirikan *tasyri'* dalam perkembangan masyarakat. Ada hal-hal yang tidak disepakati dan tidak diinginkan oleh *syar'i* dalam menetapkan kemashlahatan masyarakat.

Kedua, ketetapan *tasyri' sahabat* dan *tabi'in*, begitu juga imam-imam mujtahid. Nyatanya mereka mensyariatkan hukum untuk menetapkan secara mutlak kemashlahatan masyarakat. Bukan hanya sekedar untuk mengadakan saksi dengan keterangan-keterangan yang diberikannya.

¹⁵² Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-I*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 130-133.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali, Muhammad ‘Abd. Al ‘Ati Muhammad, *Al Maqashid al Shar’iyyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*. Kairo: Dar al Hadith, 2007.
- ‘Allal al-Fasiy, *Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, Rabat: Maktabah
- Abbas, Ria Renita “Institusi Keluarga Dan Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami yang Berpoligini di Kota Makassar)”, *Jurnal Socius*, Volume XV, Januari - April 2014
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abi Muhammad bin Ahmad bin Qadamah, *Al-Mughni*, Cetakan 1, Birut: Daar Al-Fiqr, 1404H/ 1984M.
- Abu Abdillah Bin Isma’il, *Shohih Bukhari*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th, Hadis No 4677.
- Abu Hamid al-Ghazālī, *Al-Mustasyfā fi ‘Ilm al-Ushūl*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1993.
- Abū Zahrah, Muhammad, *Ushūl al-Fiqh* Beirut; Dār al-Fikr, 1957.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Al Raisuni, Ahmad, *Nadhariyat al Maqashid‘Inda al Imam al Shatibi*, Beirut: Al Muassasat al Jam’iyat, 1992.
- Al Thohir Al Hadad, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- al-‘Ubaidi, Hamadi, *Ibn Rusyd wa ‘Ulum al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar alFikr al-‘Arabiyy, 1991.
- Alam, Nur dan Harmon Harun, *Himpunan Undang-undang Kepegawaian*, Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 2003.
- Al-Hasani, Ismail, *Nadzariyat al-Maqashid‘Inda al Imam Muhammad al Thahir bin ‘Ashur*. Herdon: Al Ma’had al ‘Alami li al fikr al Islami, 1995.
- al-Hauli, Maher Hamid, *al-Istiqlal wa Dauruhu fi Ma’rifati Maqashid al-Syari‘ ‘Inda al-Imam al-Syatibi*, Ghaza: al-Jamiah al-islamiyyah, 2010.

- Al-Husaini, Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar*, T.k: t.p, t.t.
- Ali Imron, *Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet Ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibi al-Arba'ah*, Kairo: Dārul Hadist al-Qahira, t.t, Juz 4.
- Al-Maalibari, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathu Al-Mu'in bi Syarh Quratu Al-A'in*, Cirebon: Al-Maktaba Al-Misria, t.t..
- Al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy, *Qowanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah*, Birut: Dār Al-Ilmi Li Al-Maliyyin, 1974.
- Al-Nawawi, Abi Zakariya Yahya, Edisi Syaih 'Adil Ahmad Abd Al-Maujud, *Raudah At-Talibin*, Cetakan kesatu, Birut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1412H/ 1992M
- al-Salam, Izz al-Din ibn 'Abd, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz ke-1, Kairo: Maktabat al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1994.
- al-Siba'iy, Mustafa Hasaniy, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Damaskus: al-Dar al-Qaumiyyah, 1379 H/1960 M.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, Beirut: Dar Al-Kotob AlIlmiyah, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama", *Jurnal Privat Law*, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.
- Arikunto, "Suharsimi Arikunto.Pdf," in *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik-Revisi Ke X*, 2010.
- Ashur, Muhammad Tahir Ibnu. *Maqashidal Syariah*. Yordania: Dar al Nafais, 2001
- Asrori, Achmad, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Jurnal Al-'Adalah,

Vol. XII, No. 4 Desember 2015, Dapat dilihat di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>

- Asy-Syatibi, Abu Ishak, *Al-I'tisham Jilid II*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Asyyaukani, *Irsyād al-Fuhūl*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994.
- Auda, Jasser, *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, Herndon: IIIT, 2007.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid al-Syāṭ'ah Menurut al-Shatibi*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta : Al Kautsar, 1990.
- Bingah Amarwata Sujana, “Kritik Terhadap Poligami: Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Padjadjaran Law Review*, Vol. III, Desember 2015.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Cet. Ketiga, Jakarta: Amzah, 2014.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Depag RI , *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Ditbinbaga Islam, 1997.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet.ke- III, 2005.
- Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama, *Pedoman Kepegawaian*, 2006,
- Gatot, Istomo, *Himpunan Lengkap Undang-undang dan Peraturan-peraturan Kepegawaian Negara*, cet. 1, jilid III, Bandung: P.T Karya Nusantara, , 1982.
- Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Habib, Muhammad Bakr Ismail, *Maqashid al Islamiyah Ta'silan wa Taf'ilan*. Makkah: Dar al Tibah al Khadra', 2006.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi'awwaliah*, Juz I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hasaballah, 'Aliy, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1383 H/1964 M.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1984.

- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan, Jilid I, cetakan pertama*. Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia, 1971.
- Ibn 'Asyur, Tahir, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz ke-3, Kairo: Dar al-Hadits, 1425 H/2004 M.
- Ibn Rabi'ah, 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Ali, *Ilm Maqasid al-Syar'*, Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al- Wataniyyah, 1423 H/2002.
- Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor, 2004.
- Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M.
- Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemIA, 2005.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Mashdar al-Tasyri' al-Islami Fi ma La Nassa Fih*, Cet. III, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Memilih Monogami; Pembacaan Atas Al-Quran Dan Hadist Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Ma'ruf, Amar, "Implementasi Peraturan Perkawinan Dan Perceraian Pns Dan Pejabat Studi Pp No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990)", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Machfudz Muhammad, "Prinsip Kesetaraan Gender Dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan Dipoligami Bagi PNS Wanita" (Studi Pandangan Pakar Hukum Di Kota Malang)," Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Madkur, Muhammad Sallam, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Kairo: Dar al-Nahdah
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāsid al-Sya'āh Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, Cet. Ke-28, Jakarta: Lentera, 2011.

- Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Musgamy, Awaliah, "Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam PP. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pns," *Al-Daulah* Vol. 6,. No. 2 (2017).
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.
- Nazir, M, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nu'man Jughaim, *Thuruq al-Kasyfi 'an Maqashid al-Syari'ah*, Yordania: Dar Alnafaes, 2014.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2006.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Tanggal 21 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri sipil atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi PNS
- Qaradhwawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2012.
- Rasyid, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid*, Cet. Ke-2, Semarang: Usaha Keluarga, T.t.h.
- Rusfi, Muhammad, *Ushul Fiqih-1*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017.
- Sa'id, Bustami Muhammad, *Mathum Tajdid al-Din*, Kuwait: Dar al-Da'wah, 1405 H/1984 M.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Beirut Lebanon: Dār Al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid 3 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sahrul, "PNS Eselon II Jadi Istri Kedua," *Kupas Merdeka*, n.d., <https://www.kupasmerdeka.com/2015/10/pns-eselon-ii-jadi-istri-kedua->

pejabat-berwenang-terkesan-tutup-mata/. (diakses pada 26 Maret 2020, Pukul 13.00)

Sandi, "PNS Di Lebak Jadi Istri Kedua, Terancam Sanksi Pemecatan," *Fakta Banten*, n.d., <https://faktabanten.co.id/blog/2018/09/03/pns-di-lebak-jadi-istri-kedua-terancam-sanksi-pemecatan/>.(diakses pada 26 Maret 2020, Pukul 13.00).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980.

Situmorang, Victor M., *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1991..

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mix Method*, Cet. Ke-3, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007.

Summa, Muhammad Ammin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Supardi Mursalim , *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.

Syafi'e, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syed, Abul Hassan Najmeh, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989.

Syihab, M. Quraissy, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan Ke-6, Bandung: Mizan, 1997.

Tihami dan Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Umam, Chaerul, *Ushul Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-1, Bandung: Citra Umbara, 2012.

Wadrianto, Glori K., “Dua PNS Jadi Istri Kedua, Dipecat,” *Kompas*, n.d., <https://regional.kompas.com/read/2012/01/16/08474545/dua.pns.jadi.istri.kedua>. (diakses pada 26 Maret 2020, Pukul 13.00)

Wellikin, William I., “Kajian Hukum Perkawinan Nasional Terhadap Larangan Perkawinan Antara Hubungan Pela di Maluku Tenggara,” *Jurnal Lex Privatum* 2, No. 1 (2014), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3960/3472>.

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penterjemahan Al-Quran, 1973.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.